

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar. 2019. *Metode penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ekawati, Evy Lusya. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta Press: Yogyakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jumroh, Kalimatul & Ade Kosasih. 2015. *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, Muhamad Abas, Husnatul Mahmudah, Anita Kamilah, Zuhrah Zuhrah, Aditya Maulana Rizqi. 2023. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.
- Maringka, J. S. 2022. *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariza, Prima Idwan & Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. 2022. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Mukti Fajar ND, Y. A. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Meliala, D. S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nanang Martono., 2016. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahim, MIF, SH, M., Rahim, A., SH, M., Guwi, J., & SH, M. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah-Rajawali Pers* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saija, R., & Letsoin, R. F. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta:

Deepublish.

Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tetulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Surachman, E. R. 2022. *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Tijow, Lusiana Margareth., Hoiruddin Hasibuan. 2024. *Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya.

Wardiono, K., Kn, M., Rochman, S., & Budiwati, S. 2021. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Aliska, S., Safriadi, N., & Prihartini, N. 2018. Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 15-21).

Iswanto, J., & Atsani, U. 2021. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No 62/Pdt. G/2019/Pa. Swl). *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 1, (hlm. 101-116).

Lengkong, F. 2017. Kajian Yuridis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Lex Privatum*. Volume 5, Nomor 3, (hlm. 15-20).

Lestari, Endang Sri. 2022. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual Bumn Melalui Arbitrase. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 10, Nomor 1, (hlm. 52-62).

Mukhtar, Adriansya., Ma'ruf Hafidz, Muhammad Fachri Said. 2022. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, (hlm. 829-845).

Musdalifah, A., Syafaat, A., Yulia, W., Sutikno, & Asiz, M. 2023. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. *In Equality before the law*, Volume 2, Nomor 2, (hlm. 56-59).

Muslim, M. F. M. 2022. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Advokat. *Dinamika*, Volume 28, Nomor 5, (hlm. 3856-3868).

Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. 2017. Eksistensi Lembaga Kejaksaan

Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, (hlm. 163-182).

Putra, I. K. A. A., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Dantes, K. F. 2022. Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10, Nomor 3, (hlm. 260-268).

Prihandana, Reza., Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, Irwan Syafari. 2023. Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Haluoleo Law Review*. Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, (hlm. 111-128).

Riza, Faisal., Rachmad Abduh. 2019. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (Hlm. 77-86).

Rusdianto. 2015. Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 99-108).

Rewabawadewa, A. 2022. Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 3, Nomor 1, (hlm. 90-97).

Sasongko, Andy. 2022. Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum). *Jolsic: Jurnal Of Law Society And Islamic Civilization*, Volume 10, Nomor 2, (hlm. 105-121)

Simanjuntak, J. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 10-16).

Simanjuntak, Juristoffel. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 152-163)

Sudirdja, R. P. 2020. Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing Dalam Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Kejaksaan Yang Profesional, Komunikatif dan Akuntabel. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, (hlm. 828-840).

Sonata, D. L. 2014. Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, (hlm. 15-35).

Syafaat, Musdalifah Asiyatum., Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H., Mariya Asiz, M.H. 2023. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong. *Equality Before The Law*, (hlm. 80-93)

Tinambunan, Wahyu Donri., & Galih Raka Siwi. 2022. Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2*, (hlm. 125-142)

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. 2019. Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Volume 21, Nomor 02, (hlm.12-27).

SKRIPSI

Putra, R. W. 2018. *Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian Dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

Utami, W. P. 2022. *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasa Idariyah* (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Staatsblaad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keppres Nomor 55 Tahun 1991 Pasal 3 Huruf c, huruf d, Pasal 24, Pasal 25 huruf e. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

